



**Judul** : Kaji ulang kerja sama RI-Singapura  
**Tanggal** : Senin, 04 Nopember 2013  
**Surat Kabar** : Suara Karya  
**Halaman** : 3

## PERJANJIAN EKSTRADISI

# Kaji Ulang Kerja Sama RI-Singapura

*JAKARTA (Suara Karya): Perjanjian kerja sama pertahanan (defence cooperation agreement/ DCA) antarmiliter Indonesia dengan Singapura harus dikaji ulang. Sebab, dari sisi apapun kerja sama itu tak menguntungkan Indonesia, sebaliknya keuntungan besar dirasakan negara tetangga itu.*

Demikian dikatakan Ketua DPR Marzuki Ali, anggota Komisi I DPR Susaningtyas Kertopati, dan peneliti Lemba Ilmu Pengetahuan Indonesia (LPI) Alfitra Salam, secara terpisah, di Jakarta, Minggu (3/11).

Perdebatan DCA antar Indonesia dan Singapura sudah terjadi sejak tahun 2007. Keinginan Singapura, DCA dijadikan satu paket dengan perjanjian ekstradisi (*extradition treaty/ET*). Parlemen Indonesia punya pandangan DCA dan ET tak memiliki ke-

terkaitan. Kedua bidang itu yang sangat berbeda.

"Perjanjian kerja sama pertahanan dan perjanjian ekstradisi merupakan dua sosok yang berbeda sehingga tak bisa disatukan ataupun disamaratakan menjadi sama," kata Marzuki.

Atas dasar ini pula DPR menolak meratifikasi DCA. Marzuki menyatakan, jika Singapura punya keseriusan dan niat baik untuk menjalin kerjasama pertahanan dan ekstradisi dengan Indonesia, maka kedua bidang kerja sa-

ma itu harus terpisah. "Singapura harus membuka perjanjian ekstradisi tersendiri atau terpisah dari DCA," ujar Marzuki.

Melalui perjanjian ekstradisi akan mempersempit ruang gerak koruptor asal Indonesia kabur ke Singapura. Menurut Susaningtyas, persejuaan DCA dengan Singapura menodai rasa kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. DCA membuka pintu bagi Singapura untuk menggunakan wilayah Indonesia empat kali dalam setahun untuk latihan militer.

Indonesia tidak mendapat apa-apa kecuali perjanjian ekstradisi yang juga masih bergantung pada hukum Singapura. "Jadi dilihat dari sudut apapun, menurut saya ditolak saja," ucap Susaningtyas.

Alfitra menilai, DCA akan memudahkan Singapura un-

tuk memetakan wilayah Indonesia, termasuk mencari potensi-potensi yang ada di Indonesia. "Meski tak ada gelegat negara itu akan menyerang Indonesia, namun perjanjian pertahanan itu sangat menguntungkan Singapura," ujarnya.

Menurut dia, Singapura hanya ingin mengamankan perekonomiannya di Selat Malaka. Latihan perang bersama menjadi wadah pengawasan dan pengamanan kepentingannya.

"Dengan melakukan latihan bersama di wilayah Indonesia dengan masa latihan lima hari per minggu, maka Singapura akan bisa mengamankan Singapura, Natuna dan Kalimantan," katanya.

Kecurigaan Alfitra menilai sikap Singapura begitu menggebu-gebu untuk membuat perjanjian tersebut, dan kecurigaan masyarakat bertam-

bah ketika pemerintah, dalam hal ini Departemen Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan sangat tertutup dalam pembahasan DCA. "Saya tidak tahu apakah DCA ini merupakan bentuk kekonyolan Indonesia atau kepandaian Singapura," ujar dia.

Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Singapura melalui Sekretaris I Terrence Teo melalui siaran tertulis yang diterima *Suara Karya*, menyatakan Singapura dan Indonesia telah melakukan perundingan dan menandatangi Perjanjian Ekstradisi dan Perjanjian Kerjasama Pertahanan dalam satu paket pada 27 April 2007.

"Singapura siap menjalankan kedua perjanjian dalam satu paket tersebut, namun di sisi lain DPR RI belum meratifikasi perjanjian-perjanjian tersebut," katanya.

(Feber 8)